Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 29592-29603

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

Theresa Anselma Laurina[1], Henrikus Herdi[2], Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng[3]
[1,2,3]Universitas Nusa Nipa

Corresponding Author: Theresa Anselma Laurina, cemtini100199@gmail.com

Published: October , 2025

ABSTRAK

Struktur organisasi suatu perusahaan atau instansi membagi tugas dan wewenang ke dalam unit-unit tertentu yang pada umumnya didasarkan pada fungsi, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab sehingga memudahkan pimpinan dalam hal pengawasan dan pengendalian. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban evaluasi anggaran dengan anggaran sebagai alat pengendalian pada Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Sikka. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **KPU Kabupaten Sikka** belum sepenuhnya menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara optimal, **Anggaran** berfungsi sebagai alat utama pengendalian belanja di KPU Sikka, digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan, **Evaluasi anggaran** dilakukan secara rutin dengan membandingkan realisasi dan rencana anggaran.

Kata kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban; Alat Pengendalian; Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

The organizational structure of a company or agency divides tasks and authorities into specific units, generally based on function, type of work, and responsibilities, thus facilitating leadership in supervision and control. The purpose of this study is to determine the application of budget evaluation accountability accounting, with the budget as a control tool, at the Sikka Regency General Election Commission. This type of research uses a descriptive qualitative approach that leads to a detailed and in-depth description of both conditions and processes, as well as their relationships or interconnections regarding the main points found in the research objectives. The results show that the Sikka Regency General Election Commission (KPU) has not fully implemented accountability accounting optimally. The budget serves as the primary tool for controlling expenditures at the Sikka KPU, used in planning, implementing, monitoring, and evaluating activities. Budget evaluation is conducted routinely by comparing realization and budget plans.

Keywords: Accountability Accounting; Control Tool; General Election Commission

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak lepas dari segala bentuk pengendalian, begitupun pada instansi pemerintahan. Pengendalian ini dilakukan ialah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengendalian yang baik, dapat membantu para manajer untuk memusatkan perhatian pada masalah operasional manajemen pada waktu yang lebih awal untuk pengendalian yang lebih efektif. Sehingga, disusunlah tugas pokok untuk setiap tingkatan bidang dengan pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban, beserta laporan anggaran dan realisasinya dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut (Torina dkk., 2022).

Sumarsan (2020) menjelaskan terkait konsep efisiensi dan efektivitas yang selalu dipergunakan dalam menilai kinerja dari suatu pusat pertanggungjawaban. "Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang dipergunakan", sedangkan "efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut". Artinya, suatu pengendalian pada organisasi atau perusahaan (instansi) dikatakan efisien dan efektif apabila segala rencana dan program yang telah dibuat, dikerjakan dan dilakukan dengan benar sehingga mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan (instansi).

Struktur organisasi suatu perusahaan atau instansi membagi tugas dan wewenang ke dalam unit-unit tertentu yang pada umumnya didasarkan pada fungsi, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab sehingga memudahkan pimpinan dalam hal pengawasan dan pengendalian. Di dalam ilmu akuntansi, ini dikenal dengan nama akuntansi pertanggungjawaban, yaitu salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan (Salesti dkk., 2022).

Menurut Mulyadi (2001) akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan aset, belanja , dan pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban di dalam sebuah perusahaan. Tujuannya agar ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan aset, belanja , dan pendapatan yang dianggarkan. Pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban setidaknya terdiri dari 4 (empat) pusat, yaitu diantaranya pusat belanja (expense center), pusat pendapatan (revenue center), pusat laba (profit center), dan pusat investasi (investment center). Para manajer dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, harus berfokus pada fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) yang mana menuntut para manajer untuk bisa merencanakan dan mengorganisasikan staf dan/atau pegawai serta sumber daya yang ada, untuk melaksanakan program kerja serta mengendalikan atau melakukan pengawasan pekerjaan. Program-program kerja yang telah dibuat, kemudian dituangkan ke dalam angka-angka dalam bentuk tabulasi yang dinamakan anggaran, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam menjalankan operasional perusahaan supaya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Salesti dkk., 2022). Akuntansi pertanggungjawaban yang telah diterapkan dengan baik dan memadai akan membantu perusahaan atau instansi dalam melaksanakan operasi perusahaan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan atau instansi yang optimal dapat dicapai. Untuk menilai apakah penerapan daripada akuntansi pertanggungjawaban telah diterapkan secara baik pada suatu organisasi atau perusahaan, menurut Mulyadi yaitu melalui penerapan syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu struktur organisasi, anggaran, pemisahan belanja , nomor akun yang ditetapkan oleh perusahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Menurut Miran (2015) anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur lainnya yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dengan adanya analisis selisih anggaran dapat diketahui penyimpangan yang terjadi pada suatu organisasi atau unit-unit dalam perusahaan. Ini menunjukkan bahwa anggaran menjadi alat yang digunakan dalam perencanaan keuangan, dan juga sebagai pengendalian belanja dalam akuntansi pertanggungjawaban. Sehingga, setiap pusat pertanggungjawaban akan bertanggung jawab untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Erika Sharon (2021) akuntansi pertangggungjawaban merupakan sistem yang menyajikan informasi mengenai pendapatan serta belanja atau aktiva yang di kaitkan dengan suatu bagian atau unit dalam perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa dan sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang diawasinya. Untuk dapat diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban, ada lima syarat menurut Mulyadi (2021) yaitu: struktur organisasi, anggaran belanja , penggolongan belanja , pengklasifikasian kode akun dan sistem laporan belanja .

Penelitian mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Satu diantaranya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Rosa Maria,dkk (2023) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Angggaran seagai alat

pengendali biaya pada Pintar Asia Swalayan Maumere. Hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya menerapkan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban karena dalam proses penyusunan anggaran belanja belum melibatkan semua unit yang ada dalam perusahaan tersebut dan belum ada pemisahan belanja antara belanja terkendali dan tidak terkendali. Pengendalian belanja juga belum sepenuhnya efisien karena masih terdapat selisih antara belanja yang dianggarkan dengan belanja yang direalisasikan.

Pada penelitian sebelumnya, Fokus Obyek yang diteliti yaitu pada organisasi sektor bisnis, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah organisasi sektor publik yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Peneliti pada penelitian ini melakukan penelitian yang serupa mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Komisi pemilihan umum Kabupaten Sikka merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum diIndonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai lembaga yang memfasilitasi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpegang teguh terhadap asas kemandirian, kejujuran, keadilan, ketertiban, keterbukaan, keprofessionalan, keefisiensian dan keefektifan seyogyanya memiliki integritas tinggi serta tidak berpihak kepada pihak manapun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Tujuan standar akuntansi pemerintah adalah membantu penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar dapat meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan, menjadikan penyajiannya menjadi lebih terbuka dan jujur.

Sebagai salah satu organisasi sektor publik yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayan publik, pengendalian belanja menjadi aspek penting dalam pengelolaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugasnya contohnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu menghitung berbagai belanja mulai dari awal tahapan pemilu/pilkada sampai berakhirnya tahapan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif terhadap pengeluaran belanja dalam setiap unit atau bidang-bidang yang terdapat di dalamnya, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan pengendalian Belanja. Melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih terarah dan efisien. Setiap unit akan memiliki tanggung jawab yang jelas terkait dengan penggunaan anggaran yang diberikan. Dengan demikian, setiap unit atau sektor akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan dan mengendalikan Belanja yang timbul. Selain itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban juga akan memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun berdasarkan sistem akuntansi tersebut, pihak internal dan eksternal, termasuk masyarakat, dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran serta kinerja dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian (Sutopo, 2006).

Teknik Pengumpulan Data

Data adalah keseluruhan keterangan (informasi) mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol

untuk merekam/ mencatat informasi (Creswell, 2016: 253). Beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah:

Wawancara mendalam *(indepth interview).*

Penelitian ini berfokus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Wawancara ini dilakukan terhadap Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sikka, Ketua KPU, Bendahara KPU. Penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian dalam pengamatan ini, penulis merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur.

Studi dokumen.

Dokumen ini bisa berupa dokumen laporan pertanggungjawaban.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction).

   Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007:247).
2. Penyajian Data/ Display.

   Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.
3. Verifikasi Data (Conclusions drowing/verifiying).

   Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yag dikemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

   Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan itu juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Berdasarkan dari data yang diperoleh di lapangan, peneliti berusaha mencari maksud dari data tersebut kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang ada, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang selanjutnya diverifikasi secara berkelanjutan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama proses penelitian. Verifikasi perlu dilakukan karena dalam hal ini adalah penelitian kualitatif dengan objek manusia yang setiap detiknya bisa berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Pengendalian Belanja pada KPU Sikka

Sesuai dengan teori yang dijabarkan pada bab dua, terdapat beberapa syarat dan karakteristik yang harus dipenuhi agar penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil analisis mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dilihat dari syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban.

1. Syarat- syarat Akuntansi Pertangungjawaban
    a. Struktur Organisasi

Sesuai dengan teori yang dijabarkan pada bab dua, terdapat beberapa syarat dan karakteristik yang harus dipenuhi agar penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil analisis mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dilihat dari syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban.

Berikut adalah hasil percakapan yang dilakukan dengan Ketua KPU Sikka, Bapak Harimanto yang mengungkapkan bahwa:

"Di KPU Sikka memang sudah mempunyai struktur organisasi dan struktur organisasi yang ada juga sudah menggambarkan aliran tanggung jawab dan posisi yang jelas. Nah, di KPU Sikka ini sendiri untuk dia punya aliran penumpahan tanggung jawab itu sendiri bergerak dari tingkatan yang paling atas ke tingkat yang paling bawah, sedangkan untuk aliran pertanggungjawabannya mengalir dari tingkat bawah ke atas. Nah, kalau terkait dengan adanya resiko ketika penempatan pegawai itu sebenarnya tidak sesuai dengan bidang yang ditempati tentunya ada. Dan untuk bisa meminimalisir hal ini maka kita lakukan atau kita adakan pelatihan.

Selanjutnya, informasi serupa juga diperoleh dari percakapan yang dilakukan dengan Bapak Semuel D. Sing selaku Plt. Sekretaris KPU Sikka sebagai berikut:

"Terkait dengan pengangkatan jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi, diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Struktur organisasi yang ada juga menggambarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab yang jelas"

Kemudian, Ibu Mega Suryati Azhar selaku kasubag keuangan umum dan logistik memperjelas kembali bahwa:

"Penetapan tugas dan tanggungjawab di KPU Sikka ini sudah sesuai dan bisa dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan struktur organisasi yang ada"

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil percakapan dengan beberapa informan di atas, diketahui bahwa struktur organisasi dan pendelegasian wewenang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka secara jelas menggambarkan tanggungjawab dan tugas di setiap tingkatan manajemen. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka juga telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas, dan tanggungjawab dari unit kerja, dan masing-masing bagian memiliki tanggungjawab yang sama dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pilkada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	DETAIL	PAGU	TOTAL REALISASI	SISA PAGU	PRESENTASI (%)
1	Pagu Keselurhan	21,739,652,000	20,121,464,021	1,618,187,979	93
	Rincian :				
	Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024		2,310,000		
	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara		167,268,900		
	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis		1,419,795,916		
	Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP		395,538,100		
	Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih		395,538,100		
	Penyerahan Surat Dukungan, Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan		172,358,406		
	Pencalonan		347,591,200		
	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye		280,480,000		
	Laporan Audit Dana Kampanye		246,720,500		
	Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara		582,807,550		
	Advokasi Hukum		-		
	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		658,955,324		
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Aplikasi		107,060,000		
	Rapat Kerja dan dan Supervisi		39,405,000		
	Perjalanan Dinas		1,273,586,456		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran KPU Kabupaten/Kota		151,665,201		
	Operasional Badan Adhok KPPS		13,995,885,000		
	Pengolahan Logistik Pemilihan		95,485,468		
	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc		81,351,000		
	Riset Pemilihan		-		
	Honorarium Penyelenggara Pemilihan		103,200,000		

Peran dan Evaluasi Anggaran dalam Pengendalian Belanja pada KPU Sikka

Bagi setiap perusahaan atau organisasi anggaran menjadi sebuah instrumen penting dalam perencanaan dan pengendalian efektif jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, pengendalian merupakan kegiatan manajemen yang bertujuan memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Belanja, di sisi lain, merujuk pada uang tunai atau nilai setara tunai yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat bagi organisasi baik pada saat ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, pengendalian belanja dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian belanja ini dapat dilakukan melalui penggunaan anggaran belanja yang terus-menerus dipantau dan dianalisis untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melakukan pengendalian belanja dengan menyusun laporan pertanggungjawaban atas belanja-belanja yang dikeluarkan. Laporan pertanggungjawaban tersebut memuat rencana anggaran, realisasi dan selisih yang kemudian dapat diketahui sejauh mana manajer pusat pertanggungjawaban mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Penilaian kinerja manajer dapat dilakukan dengan melihat penyimpangan yang terjadi dalam pelaporan pertanggungjawaban, kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan sehingga tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dapat tercapai. Dalam melakukan penyusunan dan pengelolaan anggaran biaya tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka memerlukan perencanaan dan pengendalian belanja yang tepat agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga dapat terhindar dari biaya yang tak terduga.

Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka anggaran memainkan peran vital dalam pengendalian belanja. Melalui proses perencanaan dan penganggaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan monitoring yang memungkinkan manajemen untuk memantau realisasi belanja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Anggaran menyediakan informasi berharga untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan menerapkan anggaran secara efektif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dapat mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan dan pengelolaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melibatkan setiap unit atau bidang yang terdapat dalam struktur organisasi. Pengelolaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Semuel selaku Plt. Sekretarus sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari membuat rencana dan penyusunan anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap kegiatan, program, dan proyek yang ditentukan, sampai pada pelaksanaan anggaran serta pelaporan dan evaluasi anggaran yang mencakup informasi tentang penggunaan anggaran.

Informasi yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan Bapak Samuel mengenai peran anggarn dalam pengendalian biaya mengungkapkan:

"Ya, melalui laporan pertanggungjawaban ini, anggaran digunakan sebagai alat pengendalian biaya dalam pengelolaan anggaran. Karena, laporan pertanggungjawaban dapat memberikan informasi tentang penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan."

Dalam penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan menganalisis anggaran tersebut, dapat diketahui efisiensi dari pengendalian belanja yang telah dilakukan oleh instansi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengelolaan anggaran dimulai dari tahap membuat rencana dan penyusunan anggaran sampai pada pelaksanaan anggaran serta pelaporan dan evaluasi anggaran yang mencakup informasi tentang penggunaan anggaran dalam proses pengendalian belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Hasil percakapan yang dilakukan dengan Ibu Mega Suryati terkait dengan evaluasi anggaran dalam pengendalian biaya mengungkapkan:

"Iya, disini pasti kita lakukan evaluasi untuk melihat efisiensi penggunaan dan pengendalian dari belnaja atau anggaran yang digunakan."

Pembahasan

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Pengendalian Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Menurut Hansen dan Mowen (2009), akuntansi pertanggungjawaban mencakup empat unsur utama, yaitu: penetapan tanggung jawab, pembuatan tolok ukur atau standar kinerja (benchmarking), evaluasi kinerja melalui perbandingan realisasi dan anggaran, serta pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment) berdasarkan capaian kinerja. Sistem ini sangat penting dalam lingkungan birokrasi publik seperti KPU karena berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan.

Di KPU Kabupaten Sikka, penerapan akuntansi pertanggungjawaban telah dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi yang memadai, di mana terdapat garis komando dan tanggung jawab yang jelas mulai dari Ketua dan Anggota KPU, Sekretariat KPU, sampai ke sub bagian di bawahnya seperti Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum, SDM, serta Perencanaan, Data dan Informasi. Garis komando bergerak dari atas ke bawah, sedangkan garis tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas sebagaimana diamanatkan dalam prinsip organisasi modern menurut Mulyadi (2001), yang menyatakan bahwa suatu organisasi harus memiliki alur wewenang, tanggung jawab, serta pembagian tugas yang terstruktur agar kontrol dan pertanggungjawaban dapat berjalan optimal.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Sikka sebagai satuan kerja juga terlibat dalam proses penyusunan anggaran tahunan yang digunakan untuk membiayai seluruh tahapan pemilu. Hal ini penting karena anggaran tersebut tidak hanya sebagai alat perencanaan kegiatan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kinerja. Setiap bagian di KPU Sikka dilibatkan dalam penyusunan anggaran sesuai prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa unit kerja sebagai pusat pertanggungjawaban wajib turut serta dalam menyusun anggaran agar kebutuhan riil di lapangan terakomodasi. Selain itu, anggaran ini dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, serta dasar untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Namun demikian, terdapat kelemahan dalam penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban di KPU Kabupaten Sikka, yaitu belum adanya pemisahan antara belanja terkendali dan belanja tidak terkendali secara eksplisit dalam pelaporan keuangan. Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, pemisahan belanja ini penting dilakukan untuk membedakan belanja yang dapat dikendalikan oleh manajer unit kerja tertentu dengan biaya yang berada di luar kendali mereka. Belana terkendali di KPU Sikka dapat mencakup misalnya biaya konsumsi rapat, ATK, biaya operasional kendaraan dinas, serta honorarium kegiatan sosialisasi pemilu yang keputusannya ada di tangan KPU Sikka. Sementara biaya tidak terkendali bisa meliputi gaji PNS yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, pengadaan logistik pemilu yang ditentukan KPU RI, serta biaya lain yang sifatnya diputuskan di tingkat pusat.

Walaupun dalam praktik penyusunan anggaran belanja-belanja ini tetap diakomodasi dalam laporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Sikka, pengelompokan resmi dalam kategori belanja terkendali dan tidak terkendali belum dilaksanakan. Padahal, dengan melakukan pemisahan ini, pengendalian internal akan lebih efektif karena dapat diketahui mana bagian belanja yang menjadi tanggung jawab langsung unit kerja, dan mana yang tidak dapat dipengaruhi secara lokal.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sikka telah melaksanakan pengkodean rekening anggaran secara memadai, sesuai standar pemerintah, di mana setiap transaksi memiliki kode unik yang memudahkan pelacakan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan. Laporan realisasi anggaran disusun secara periodik dan mencantumkan informasi penting berupa pagu anggaran, realisasi, sisa anggaran, serta selisih yang terjadi. Laporan ini digunakan oleh pimpinan KPU untuk melakukan evaluasi kinerja tiap unit kerja serta menjadi alat pengawasan internal dan eksternal oleh inspektorat dan BPK.

Selanjutnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban di KPU Kabupaten Sikka juga melibatkan penetapan pusat pertanggungjawaban, di mana unit-unit kerja seperti Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum bertindak sebagai pusat belanja, yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan dana kegiatan pemilu. Sementara potensi pendapatan (meski sangat kecil di KPU) dapat berupa penerimaan dari dana hibah atau sumber sah lainnya, menjadikan KPU juga dapat dikategorikan sebagai pusat pendapatan terbatas.

Sebagai pusat belanja, tiap unit kerja di KPU Kabupaten Sikka berkewajiban merencanakan kebutuhan anggaran, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, mengontrol pengeluaran, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Evaluasi atas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana (anggaran) dan realisasi, untuk kemudian dianalisis penyimpangan yang terjadi. Apabila ditemukan penyimpangan signifikan, maka KPU Sikka melakukan langkah perbaikan melalui revisi anggaran atau pengendalian ketat pada periode anggaran berikutnya.

Dalam pelaksanaan sistem ini, KPU Kabupaten Sikka telah menjalankan mekanisme reward and punishment meskipun secara sederhana. Pegawai atau unit kerja yang mampu melaksanakan tugas secara baik, tepat waktu, dan sesuai anggaran mendapatkan apresiasi seperti piagam penghargaan atau kesempatan pelatihan dan promosi jabatan. Sebaliknya, bagi pegawai atau unit kerja yang tidak mencapai target atau melakukan pelanggaran prosedur, dapat dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, atau evaluasi kinerja sebagai bentuk punishment. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang produktif, disiplin, dan berorientasi hasil di lingkungan KPU Kabupaten Sikka.

Teori agensi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban karena keduanya sama-sama mengatur hubungan antara pihak yang memberikan kuasa (principal) dan pihak yang menerima kuasa untuk melaksanakan tugas tertentu (agent). Teori agensi sendiri menggambarkan suatu hubungan kontraktual di mana principal memberikan hak dan kewenangan kepada agent untuk menjalankan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan organisasi, diiringi dengan tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Dalam konteks pemerintahan daerah, Kepala Daerah Kabupaten Sikka bertindak sebagai principal yang memberikan mandat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka sebagai agent untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai agent, KPU Kabupaten Sikka berkewajiban melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu dengan penuh tanggung jawab, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, anggaran, maupun hasil kerja. Hubungan principal-agent ini menimbulkan kebutuhan akan sistem pengendalian yang efektif agar agent tidak menyimpang dari kepentingan principal. Di sinilah pentingnya penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu suatu sistem yang menekankan pemisahan tugas, tanggung jawab, serta pengukuran kinerja di masing-masing unit atau pusat pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban di KPU Kabupaten Sikka telah diterapkan dengan cukup memadai dalam mendukung pengendalian belanja dan kinerja organisasi, meskipun masih ada aspek penting yang perlu diperbaiki, yaitu pemisahan belanja terkendali dan tidak terkendali secara eksplisit dalam laporan keuangan. Dengan adanya perbaikan ini diharapkan KPU Kabupaten Sikka dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, memperkuat akuntabilitas anggaran publik, serta memberikan keyakinan lebih bagi stakeholder terkait mengenai tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Peran dan Evaluasi Anggaran Dalam Pengendalian Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Secara konseptual, anggaran dipandang sebagai elemen fundamental dalam proses pengelolaan keuangan sebuah organisasi, khususnya organisasi sektor publik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka. Dalam praktik manajemen keuangan pemerintah daerah, anggaran tidak hanya sekedar dokumen formal yang memuat daftar pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi alat strategis dalam perencanaan, pengendalian, pengawasan, hingga evaluasi kinerja suatu entitas publik. Sebagaimana disampaikan oleh Lukito dan Retnani (2015), anggaran memegang peran sentral sebagai alat akuntabilitas, yang mencakup fungsi-fungsi utama yaitu perencanaan kegiatan, pelaksanaan program kerja, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Sikka dirancang untuk mendukung pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Penyusunan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Sikka melibatkan proses identifikasi kebutuhan belanja secara rinci, baik belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan pemilu seperti pengadaan logistik surat suara, kotak suara, tinta, bilik suara, honorarium

penyelenggara pemilu di tingkat TPS, maupun belanja tidak langsung seperti belanja operasional kantor, pemeliharaan aset, dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian, anggaran berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta tepat waktu sesuai dengan rencana kerja tahunan KPU.

Dalam kerangka akuntansi pertanggungjawaban, anggaran memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai alat untuk perencanaan sumber daya keuangan agar setiap kegiatan dapat dibiayai sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kedua, sebagai alat pengendalian belanja, di mana pelaksanaan belanja diawasi secara ketat untuk menghindari terjadinya pemborosan, penyimpangan, atau ketidaktepatan sasaran. Bawang dkk. (2023) menegaskan bahwa pengendalian belanja merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa realisasi belanja tidak menyimpang secara signifikan dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal demi pencapaian tujuan organisasi.

Di KPU Kabupaten Sikka, pengendalian belanja dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting. Tahapan pertama adalah perencanaan anggaran, di mana setiap bagian/unit kerja mengusulkan kebutuhan belanja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan kedua adalah pelaksanaan anggaran, di mana realisasi belanja dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah disetujui, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tahapan ketiga adalah pengawasan dan monitoring, di mana realisasi belanja dibandingkan secara periodik dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah terdapat selisih (deviasi) yang signifikan. Selisih ini selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi penyebabnya, apakah karena perubahan harga barang/jasa, perubahan kebijakan, kendala teknis di lapangan, atau faktor-faktor eksternal lainnya. Tahapan terakhir adalah evaluasi, di mana hasil analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan anggaran di periode berikutnya.

Evaluasi anggaran di KPU Kabupaten Sikka sangat penting dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana target-target belanja yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Evaluasi ini juga memungkinkan manajemen KPU untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketidaktepatan dalam proses penyusunan anggaran sebelumnya, sehingga perencanaan anggaran di masa depan dapat lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Dalam hal ini, pengendalian belanja yang efektif dapat mencegah terjadinya pemborosan (inefisiensi), penyimpangan (fraud), maupun penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sikka telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, antara lain belum optimalnya pengalokasian belanja untuk pengadaan sarana prasarana yang memadai, terutama yang berkaitan dengan kelengkapan logistik pemilu, fasilitas pendukung kegiatan pemilu di tingkat kecamatan dan desa, serta fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian anggaran telah berjalan, namun efektivitas realisasi belanja masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal penyusunan anggaran berbasis kebutuhan riil (needs-based budgeting).

Selaras dengan teori agensi, hubungan antara pemerintah daerah sebagai principal dengan KPU Kabupaten Sikka sebagai agent tercermin dari pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pemilu yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari aspek pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran. Kinerja KPU Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas ini akan dievaluasi berdasarkan keberhasilannya dalam mengelola belanja secara efisien, efektif, dan akuntabel, serta dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Anthony dan Govindarajan (2005) yang menyatakan bahwa setiap unit organisasi yang merupakan pusat pertanggungjawaban harus melaksanakan pengendalian anggaran secara efektif agar kinerja manajerial dapat diukur secara obyektif. Di KPU Kabupaten Sikka, pelaksanaan pengendalian anggaran dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran (LRA), yang mencakup informasi realisasi belanja, anggaran semula, perubahan anggaran (jika ada), serta selisih anggaran. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan KPU maupun auditor eksternal untuk mengevaluasi kinerja keuangan instansi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, penerapan akuntansi pertanggungjawaban di KPU Kabupaten Sikka juga mencakup penggunaan kode rekening pada setiap transaksi belanja, yang memudahkan identifikasi jenis belanja, lokasi penggunaan anggaran, serta unit kerja pelaksana. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sikka belum sepenuhnya melaksanakan pemisahan antara belanja yang bersifat terkendali dan belanja tidak terkendali dalam laporan keuangan mereka. Padahal, menurut teori akuntansi pertanggungjawaban, pemisahan ini sangat penting untuk memberikan informasi yang lebih akurat mengenai sejauh mana pimpinan atau pengelola anggaran memiliki kendali terhadap realisasi belanja yang terjadi.

Sebagai contoh, belanja terkendali meliputi belanja alat tulis kantor, belanja bahan habis pakai, serta belanja perjalanan dinas yang dapat dikendalikan secara langsung oleh manajer atau kepala bagian di KPU Kabupaten Sikka. Sementara itu, belanja tidak terkendali mencakup belanja gaji dan tunjangan pegawai tetap, belanja listrik, air, telekomunikasi, serta belanja lain yang dipengaruhi oleh kebijakan eksternal atau regulasi pemerintah pusat. Dengan adanya pemisahan ini, proses evaluasi kinerja keuangan menjadi lebih objektif, karena manajemen hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas belanja yang berada dalam kendali mereka.

Di sisi lain, fungsi evaluasi dalam akuntansi pertanggungjawaban juga didukung oleh sistem reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Sikka. Reward diberikan dalam bentuk penghargaan atau apresiasi bagi unit kerja atau individu yang berhasil merealisasikan anggaran secara tepat sasaran dan efisien. Sebaliknya, punishment dapat berupa teguran atau sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan anggaran atau yang gagal mencapai target pelaksanaan kegiatan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab pegawai KPU dalam melaksanakan tugas mereka secara profesional.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di KPU Kabupaten Sikka telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, khususnya dalam hal pemisahan belanja terkendali dan tidak terkendali, serta optimalisasi alokasi anggaran untuk sarana prasarana pemilu. Upaya perbaikan di bidang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sikka, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan akuntabel.

KESIMPULAN

1. KPU Kabupaten Sikka belum sepenuhnya menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara optimal, terutama dalam pemisahan belanja terkendali dan tidak terkendali. Pemisahan ini penting agar evaluasi dan pengawasan belanja lebih efektif sesuai prinsip akuntansi pertanggungjawaban.
2. Anggaran berfungsi sebagai alat utama pengendalian belanja di KPU Sikka, digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Selain itu, anggaran juga membantu pengambilan keputusan agar alokasi dana lebih efisien dan mendukung pencapaian target organisasi.
3. Evaluasi anggaran dilakukan secara rutin dengan membandingkan realisasi dan rencana anggaran. Hasilnya menunjukkan efisiensi yang cukup baik, meskipun pemisahan belanja terkendali dan tidak terkendali masih perlu ditingkatkan untuk mendukung evaluasi kinerja keuangan yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Ashilah, T. (2019). www.jojonomic.com. Retrieved February 29, 2020, from https://jojonomic.com/blog/tugas-direktur

Damanik, U. N. (2020). Analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pendapatan pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

Erna Kurniawati, & Mustofa, A.(2024). Akuntabilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhock KPU Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 2124.

Martianti, M.A. and Iriyadi, I., 2020. Peranan Akuntansi Pertanggungjawban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Belanja . Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(1), pp.49-5

Mintalangi, E.S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Belanja pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. Jurnal Emba, 1046-1057.

Mulyadi. (2000). Teori Akuntansi Buku 1. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mulyadi. 2007. Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat & Rekayasa, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2016. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat & Rekayasa, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Munandar. 2015. Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja Edisi Lima. Yogyakarta: BPFE.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Rosa Maria Bawang,H.H. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Belanja pada Pintar Asia Swalayan Maumere. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 123-133.

Samryn, L.M. 2015. Akuntansi Manajemen: Informasi Belanja Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Informasi. Jakarta: Prenada Media Group.

Sujarweni, V. W. (2021). Akuntansi Manajemen : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Afabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 1996. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara